STATUS HUKUM DIVIDEN SAHAM SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MEKANISME PENGELOLAANNYA DALAM SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA
Yudha Cristovany Marbun, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media. 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2020.

Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan. Aspek Internasional*. Bandung: Refika Aditama. 2004.

Campbell, John R., Andrew W. Lo, dan A. Craig MacKinlay, *The Econometrics of Financial Markets*, Princeton University Press, Princeton, 1997.

Dixit, Avinash K. dan Robert S. Pindyck. *Investment Under Uncertainty.* Princeton: Princeton University Press. 1994.

Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.

Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.

----------, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012.

----------, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

----------, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

----------, *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2009.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STATUS HUKUM DIVIDEN SAHAM SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MEKANISME PENGELOLAANNYA DALAM SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA
Yudha Cristovany Marbun, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kholis, Efi Laila. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing. 2010.

Leonard, Herman B dan Arnold Howitt. *Managing Public Assets: Theory and Practice*. Harvard Kennedy School. Cambridge. 2018.

Mahmud, Ade. *Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. Bumi Aksara. 2021.

Martien, Dhoni. *Hukum Perusahaan*. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

----------, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Prananingtyas, Paramita. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Semarang: Yoga Pratama, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Ramadhani, Rizki *(et.al). Problematika Tindak Pidana Korupsi*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.

Saidi, Muhammad Djafar. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, et al. *Hukum Pidana Korupsi*. Serang: Sada Kurnia Pustaka. 2024.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Aneka Cara Pembedaan Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1994.

----------, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP dan KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Kencana. 2009.

Syarifuddin. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. Jakarta: Prenada Media. 2020.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STATUS HUKUM DIVIDEN SAHAM SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MEKANISME PENGELOLAANNYA DALAM SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA
Yudha Cristovany Marbun, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

United Nations Office on Drugs and Crime, *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption*. Second Edition. Vienna: United Nations. 2012.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.

Jurnal

Andries, Tamar TK. Kutipan Romli dalam "Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Mutual Legal Assistance Ri-Konfederasi Swiss Dalam Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana". *Lex Crimen* 10, No. 6. 2021.

Azzahra, Syifa Nadya et al., Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Multimedia Dehasen. Vol 4 No. 3. 2025.*

Badriyah, Siti Malikhatun. Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan. *Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011.*

Fauzia, Ana et al., "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law" *Progressive Law Review 3, No. 1. 2021.* https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46. Diakses pada 06 Oktober 2025.

Fauzia, Ana dan Fathul Hamdani. Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7* (Juli 2022).

Hadi, Syofyan dan Tomy Michael, Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration. *Jurnal Cita Hukum. Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta Vol. 5 No. 2 (2017). DOI : 10.15408/jch.v5i2.7096.* Diakses pada 13 November 2025.

Hadju, Adnan Fawwaz. Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 12,* Juni 2023.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STATUS HUKUM DIVIDEN SAHAM SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MEKANISME PENGELOLAANNYA DALAM SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA
Yudha Cristovany Marbun, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hamamah, Fatin dan Heru Hari Bahtiar. Model pengembalian aset (asset recovery) sebagai alternatif memulihkan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4, No. 2. 2019*.

Hamdani, Fathul et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat", *Primagraha Law Review 1, No. 2. 2023.*

Hanssen, et al. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia. (2025). *Milthree Law Journal, 2(1), 1-27. https://doi.org/10.70565/mlj.v2i1.87.* Diakses pada 15 Desember 2025.

Harjanti, Wiwik. Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia. *Risalah Hukum, Volume 7 Nomor 1*, 26 Juni 2011.

Hia, Ikhtiar Elvisman dan Herlina Manullang. Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Dimensi Hukum. Universitas HKBP Nomensen Medan. Vol 8 No 12,* Desember 2024.

Iglessya, Yosephine. Tanggung Jawab Direksi Dalam Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham. *Jurnal Notarius 2, No. 2. 2023*.

La Porta, Rafael, et al. Law and Finance. *Journal of Political Economy Vol. 106 No. 6. 1998.*

Latipulhayat, Atip. Editorial: Due Process of Law. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2017.*

Muwahid. Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017*.

Novriansa, Agil dan Ahmad Subeki. Konsep Fair Value dan Pengaruhnya Terhadap Relevansi: Sebuah Tinjauan Teoritis Atas Penerapan IFRS. Akuntabilitas*: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol. 8 No. 1 Januari 2014.*

Pekei, B., Hadiwidjojo, D., & Djumahir, S. The Effectiveness of Local Asset Management (A Study on The Government of Jayapura). *International Journal of Business and Management Invention, 3(3). 2014.*

Pradisetia, Rudi. Optimalisasi Pengelolaan Aset Sitaan dalam Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan 11, no. 2 (2022): 260-261, DOI: https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.315-334*, Diakses pada 15 Desember 2025.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STATUS HUKUM DIVIDEN SAHAM SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MEKANISME PENGELOLAANNYA DALAM SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA
Yudha Cristovany Marbun, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Raharjo, Satjipto. Reformasi menuju Hukum Progresif, Unisia, (53), 2016, Hlm. 238–241. https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art3. Diakses pada 10 November 2025.

S. Yuliana. Perkembangan Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25 (3). 2018*.

Situmorang, Ellyas Mozart. Legalitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. 28 Mei 2021*.

Suci, Aurora Tifani dan Yana Indawati. Penyitaan Aset Dengan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Asset Confidentiality Using A Value-Based Approach to the Assets of Corruption Criminals. *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).*

Suhartoyo. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto. *Jurnal Global Ilmiah. Vol. 2, No. 10. 2025. https://doi.org/10.55324/jgi.v2i10.246.* Diakses pada 06 Oktober 2025.

Wedha, Yogi Yasa, et al. Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi dalam Perspektif Keadilan dan Pemulihan Keuangan Negara. *Jurnal Litigasi, Vol. 26 (1) April, 2025 doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21484.* Diakses pada 10 November 2025.

Yohanes, Elwi Danil, Nani Mulyati. Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya. Padang: *Unes Law Review Vol. 6, No. 1. September 2023.*

Artikel

Akbar, Muh. Aidil. *Jenis-Jenis Saham Menurut UU PT dan Hak Pemegangnya*. ILS Law Firm. 13 April 2025. https://www.ilslawfirm.co.id/jenis-jenis-saham-menurut-uu-pt/. Diakses tanggal 11 Juni 2025.

Akbar, Muh. Aidil. *Aturan Pembagian Dividen Pemegang Saham Menurut UU PT*. *ILS Law Firm*. 14 April 2025. https://www.ilslawfirm.co.id/aturan-pembagian-dividen-pemegang-saham-menurut-uu-pt/. Diakses 2 September 2025.

Anonim. Dividen: Jenis, Pembagian, dan Prosedur Pembayarannya. Sahabat Pegadaian. Jakarta. 16 April 2025. https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/investasi/dividen-adalah/. Diakses pada 11 Juni 2025.

Anonim. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Korupsi di Indonesia*. 08 April 2025, https://siplawfirm.id/sanksi-pidana-bagi-pelaku-korupsi-di-indonesia/. Diakses pada 11 November 2025.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
STATUS HUKUM DIVIDEN SAHAM SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MEKANISME PENGELOLAANNYA DALAM SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA
Yudha Cristovany Marbun, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Anonim. 7 Ciri Saham Perusahaan yang Sering Bagi-Bagi Dividen. 12 Oktober 2024. https://bri.co.id/-tidak-diclick/-/asset_publisher/G3x3P8wG7JRn/content/7-ciri-saham-perusahaan-yang-sering-bagi-bagi-dividen/. Diakses pada 12 November 2025.

Anonim. *Owner's Right To The Fruits Produced By His Property.* Alburo Alburo and Associates Law Office. https://www.alburolaw.com/owners-right-to-the-fruits-produced-by-his-property/. Diakses pada 10 November 2025.

Aprilia, Zefanya. *5 Skandal Keuangan Terbesar, Kerugian Capai Ribuan Triliun*. *CNBC Indonesia*. 6 Februari 2023. https://www.cnbcindonesia.com/market/20230206142704-17-411375/5-skandal-keuangan-terbesar-kerugian-capai-ribuan-triliun. Diakses 1 September 2025.

Atthariq, Ricky. *Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi, Politik, Pemerintahan dan Hukum*. https://www.gramedia.com/literasi/dampak-korupsi/. Diakses pada 12 November 2025.

Auli, Renata Christha. *7 Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya*. Hukumonline.com. 23 Juni 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-jenis-tindak-pidana-korupsi-dan-contohnya/. Diakses 10 November 2025.

BPK. *Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun*. Badan Pemeriksa Keuangan RI. 9 Maret 2020. https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun. Diakses 1 September 2025.

Chaterine, Rahel Narda dan Bagus Santosa. *Kejagung Sita Aset Tanah dan Saham Milik Terpidana Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat*. Kompas.com. 06 Juli 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/07/06/18320571/kejagung-sita-aset-tanah-dan-saham-milik-terpidana-benny-tjokrosaputro-dan. Diakses 5 September 2025.

Djulfaroh, Ahmad Naufal dan Sari Hardiyanto. *Selain Jiwasraya, Berikut Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia*. Kompas.com. 17 Januari 2020. https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/17/070300165/selain-jiwasraya-berikut-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia. Diakses 1 September 2025.

Haridhi, Zilmi. *RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan*. 12 Oktober 2023. https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan/. Diakses 11 November 2025.

Hukum Untan. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding).* 15 September 2020. https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/. Diakses 10 November 2025.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STATUS HUKUM DIVIDEN SAHAM SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MEKANISME PENGELOLAANNYA DALAM SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA
Yudha Cristovany Marbun, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kejaksaan Agung RI, "Kejagung Sita Uang Rp 8,21 Miliar dari Terpidana Kasus Jiwasraya Benny Tjokro," 2023, https://nasional.kontan.co.id/news/kejagung-sita-uang-rp-821-miliar-dari-terpidana-kasus-jiwasraya-benny-tjokro, diakses 1 Mei 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: KPK, 2006.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II*. Jakarta: MA RI, 2019.

Muhid, Hendrik Khoirul. Kutipan Listya Endang Artiani dalam "*Peneliti dan Dosen UII Ungkap Jalan Keluar dari Problem IHSG Anjlok"*. Tempo.co. 25 Maret 2025. https://www.tempo.co/ekonomi/peneliti-dan-dosen-uii-ungkap-jalan-keluar-dari-problem-ihsg-anjlok-1224087. Diakses 29 Agustus 2025.

Nugraha, Muhammad Raihan. *Aturan Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham*. *Hukumonline.com*. 18 Desember 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pembagian-dividen-kepada-pemegang-saham-cl2762/. Diakses 2 September 2025.

Nugraha, Muhammad Raihan. HukumOnline. *Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana*. 14 April 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan-lt50c170b99b364/, diakses 12 November 2025.

OECD. *Asset Management for the Public Sector: Principles and Practices*. OECD Publishing, Paris. 2019.

Pawestri, Widhayani Dian. Hukum Online. *Status Perusahaan Joint Venture antara BUMN dan PT Swasta.* 13 Juni 2022. https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-perusahaan-joint-venture-antara-bumn-dan-pt-swasta/. Diakses 13 November 2025.

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, *Jaksa Pengacara Negara Dapat Mengajukan Gugatan Perdata Terkait Uang Pengganti Yang Belum Dibayar Oleh Terpidana Tipikor*. 06 September 2024. https://kejaksaan.go.id/index.php/conference/article/1557/read. Diakses tanggal 01 Desember 2025.

Sari, Ayutia Nurita. *Lembaga Pengelola Investasi, Bedanya dengan Pengelola Investasi Sejenis?*. 24 Februari 2021. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13718/Lembaga-Pengelola-Investasi-Bedanya-dengan-Pengelola-Investasi-Sejenis.html/. Diakses 13 November 2025.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STATUS HUKUM DIVIDEN SAHAM SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MEKANISME PENGELOLAANNYA DALAM SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA
Yudha Cristovany Marbun, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Salam, Hidayat. Jaksa Agung Minta Penguatan Kejaksaan Untuk Pemulihan Aset Negara. 14 Januari 2025. https://www.kompas.id/artikel/jaksa-agung-minta-penguatan-kejaksaan-untuk-pemulihan-aset-negara/. Diakses tanggal 15 Desember 2025.

Tan, Natali. *Dividen: Pengertian dan Mekanisme Pembagian*. 10 November 2025. https://legalitas.org/tulisan/dividen-pengertian-dan-mekanisme-pembagian/. Diakses tanggal 15 Desember 2025.

Tim Hukumonline. *Memahami Dampak Putusan Perkara Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya melalui Eksaminasi Publik*. Hukumonline.com. 19 Juni 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-dampak-putusan-perkara-korupsi-pt-asuransi-jiwasraya-melalui-eksaminasi-publik-lt66724c76ad0f0/. Diakses pada 1 September 2025.

Tim Hukumonline. Mengupayakan Kepastian Hukum untuk Optimisme Target Pertumbuhan Ekonomi Delapan Persen. Hukumonline. 24 Januari 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengupayakan-kepastian-hukum-untuk-optimisme-target-pertumbuhan-ekonomi-delapan-persen-lt6793528a712d8/. Diakses pada 29 Agustus 2025.

Tim Redaksi. *Hukuman Bagi Pelaku Korupsi Menurut Undang-Undang*. 14 Juli 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/07/14/00150071/hukuman-bagi-pelaku-korupsi-menurut-undang-undang. Diakses pada 10 November 2025.

Ulum, Wizdan. *Aspek Normatif dan Sosiologis dalam Ilmu Hukum*. 25 Juni 2025. https://stekom.ac.id/artikel/aspek-normatif-dan-sosiologis-dalam-ilmu-hukum/. Diakses 12 November 2025.

Tesis/Disertasi

Khilman, Iman. Peran Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Tesis* Program Magister Hukum Litigasi. Universitas Gadjah Mada. 2016.

Pardede, Sonora Gokma. Strategi Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) Tindak Pidana di Indonesia sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Tindak Pidana: Ditinjau dari Analisis Ekonomi terhadap Hukum (Economic Analysis of Law). *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2023.

Ristamana. Perampasan Aset Terpidana Korupsi yang Diperoleh dari Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat). *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Agung. 2022.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STATUS HUKUM DIVIDEN SAHAM SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MEKANISME PENGELOLAANNYA DALAM SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA
Yudha Cristovany Marbun, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Trismanto, Andi. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dengan Perampasan Aset Yang Dimiliki Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Wajo). *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum. Semarang: Universitas Islam Agung. 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STATUS HUKUM DIVIDEN SAHAM SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MEKANISME PENGELOLAANNYA DALAM SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA
Yudha Cristovany Marbun, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6595).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Penyitaan dan Perampasan Aset dalam Perkara Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 534).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 589).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 568).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448).

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
STATUS HUKUM DIVIDEN SAHAM SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MEKANISME PENGELOLAANNYA DALAM SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA
Yudha Cristovany Marbun, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 PK/Pdt/2011, tanggal 29 November 2011.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 April 2012.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor: 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2009.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020.